

Indonesia Business Links

Resource Centre for Corporate Citizenship

CSR LEARNING FORUM – 4th WORKSHOP “Integrating CSR a Business Strategy: How to Build Up People’s Capacity in Operating Sustainable CSR Infrastructures”

Hari, Tanggal	:	Kamis, 26 Juli 2007
Waktu	:	09.00 – 16.00 WITA
Tempat	:	Borneo Room, Novotel, Balikpapan
<i>Attendance List</i>	:	(terlampir)
Narasumber	:	1. Harry Miarsono, Ph.D, Kaltim Prima Coal 2. Drs. H. Awang Faroek Ishak, Bupati Kutai Timur 3. Priyo Pribadi, IMA
Moderator	:	Danie Prakosa, Indonesia Business Links
Fasilitator	:	Yayan Cahyana, Daya Dimensi Indonesia

I. Pembukaan

II. Sesi Panel

a. Presentasi I: Harry Miarsono, Kaltim Prima Coal Pemberdayaan SDM di sekitar Tambang

Tingkat Kemiskinan di sekitar Tambang

Ada fenomena yang selalu terjadi yaitu tingginya kemiskinan di area tambang tambang :

Contoh kasus di 3 perusahaan : (diambil dari www.bps.co.id/~irja dan www.bps.co.id/sulsei 2004.

- 1) PT. Freeport – tambang emas & tembaga di Kab. Mimika, Papua, tingkat kemiskinan 38.69%
- 2) PT. INCO – tambang nikel di Kab. Luwu Timur, tingkat kemiskinan 13.12%
- 3) PT. KPC – tambang batubara di Kab. Kutai Timur, tingkat kemiskinan 31.86%

Merupakan hal yang ironis, perusahaan besar menghasilkan ratusan juta dollar, tetapi daerah sekitarnya miskin.

Dampak pertambangan terhadap ekonomi lokal:

Ada multiplier aspect di 3 perusahaan tsb, dari sumber Universitas Indonesia th 2005

1) Multiplier Kesempatan kerja

Untuk Kesempatan tenaga kerja PT. INCO menempati urutan teratas sebanyak 39, diikuti oleh PT. Freeport sebanyak 37, sedangkan KPC 12 org.

2) Multiplier Output

Untuk ouput, PT. KPC menempati urutan teratas sebanyak 1.9 point, diikuti PT. INCO 1,8 point dan PT. Freeport 1.6 point.

Dapat dilihat juga bahwa Pertambangan memiliki dampak tidak langsung yang lebih besar dari dampak langsungnya. Dampak langsung misalnya gaji, dsb.

Key Message dari video KPC :

- 1) Pembangunan berkelanjutan
- 2) Tidak hanya menambang.

Sekilas tentang PT. KPC.

- ✓ Kontrak Karya (PKP2B) yang ditandatangani tgl 8 April 1982 berlaku hingga thn 2021, dan mulai beroperasi penuh thn 1992.
- ✓ Awal kepemilikan oleh Rio Tinto dan BP (50%:50%) yang kemudian diambil oleh PT. Bumi Resources Tbk pada tgl 10 April 2003.
- ✓ Terdiri 3.600 karyawan langsung dan 12.000 karyawan tidak langsung.
- ✓ Pengapalan batubara sebesar 35 juta ton thn 2006 dan rencana thn 2007 sebesar 42 juta ton.
- ✓ Penjualan ke 35 negara di Asia, Eropa, dan Amerika.

Penerimaan pemerintah dari KPC yang meliputi pajak, sewa tetap+lumpsum dan royalti batubara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Thn 2005 sebesar 272.9 juta US\$, thn 2006 sebesar 354.9 juta US\$ dan rencananya thn 2007 sebesar 449.6 juta US\$.

Pembagian royalti batubara sendiri disesuaikan dengan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembagiannya sbb :

- ✓ Royalti 13,5% dibagi ke Pemerintah pusat 20% dan Pemerintah daerah 80%.
- ✓ Royalti ke Pemerintah Daerah sebesar 80% tsb terbagi atas 16% Pemerintah Provinsi, 32% Kabupaten penghasil barubara, dan 32% lainnya dibagi ke seluruh kabupaten dalam provinsi (pro-rata)

Struktur Ekonomi di Kutai Timur

Pertambangan mendominasi kegiatan ekonomi di daerah Kutai Timur yaitu sebesar 82%, lainnya terdiri atas pertanian 6%, perdagangan 4%, konstruksi bangunan 3%, transportasi 2%, lain-lain 3%.

Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kutai Timur, ada gap yang besar antara PDRB dengan batubara dan PDRB tanpa batubara. Terlihat jelas bahwa PDRB dengan batubara jauh melampaui PDRB tanpa batubara dari tahun ke tahun.

Tantangan CSR bagi KPC

- 1) Bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan?
- 2) Bagaimana meningkatkan daya saing masyarakat lokal?
- 3) Bagaimana mengubah SDA tak terbarukan menjadi SDA terbarukan?

Sasaran Program CSR KPC

Ada 7 Program yang dilaksanakan yaitu

- 1) Agribisnis
- 2) Kesehatan Masyarakat
- 3) Pendidikan
- 4) Pengembangan UKM
- 5) Pembangunan Infrastruktur
- 6) Pelestarian alam/budaya
- 7) Pengembangan SDM

Sasaran/Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- ✓ Memenuhi persyaratan AMDAL (2005)
- ✓ Amanat Perusahaan

- ✓ Memenuhi kebutuhan masyarakat (mulai dari sekitar tambang, Kutai Timur, hingga Kaltim)
- ✓ Mendukung program pemerintah
- ✓ Menjalin hubungan masyarakat (mulai dari tingkat desa hingga pusat)
- ✓ Ikut mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)

KPC memiliki keperdulian yang besar dalam pengembangan SDM.

KPC ikut mendukung MDG, karena Indonesia masih dinilai sebagai negara yang sangat ketinggalan dalam pencapaian MDG

Alokasi dana CSR KPC sebagai berikut : 3.5 juta US\$ untuk Community Development (disalurkan terutama untuk Daerah sekitar tambang dan Kegiatan2 di daerah Kutai Timur secara keseluruhan) dan sisanya 1.5 juta US\$ untuk dana kemitraan/partnership fund.

Program pemberdayaan SDM ditujukan untuk :

- ✓ Pemberdayaan Petani dan Nelayan
- ✓ Pemberdayaan Siswa, Guru, dan Para Medis
- ✓ Pemberdayaan Pengusaha dan Kontraktor Lokal
- ✓ Pemberdayaan Pemuda dan Tokoh Masyarakat/Tomas
- ✓ Pemberdayaan Kelembagaan

Bagaimana Pemberdayaan SDM yang berhasil ?

- ✓ Memiliki keterlibatan masyarakat yang tinggi
Program tidak akan berhasil jika peran serta masyarakat rendah.
- ✓ Berdasar pada kemampuan masyarakat dan potensi daerah
- ✓ Mempunyai manfaat jangka panjang dan berkesinambungan

Contoh Pemberdayaan SDM :

1) Program Pendampingan PDAM

- ✓ Air bersih merupakan komponen paling penting dalam pembangunan & dalam upaya mengurangi kemiskinan. Masih banyak masyarakat Sengatta yang belum mendapatkan pelayanan air bersih yang memadai.
- ✓ Pengolahan air yang ada belum mampu beroperasi secara maksimal.
- ✓ Program ini dimaksudkan untuk pemberdayaan PDAM dalam pengelolaan air bersih. Bagaimana mendidik operator-operator PDAM menjadi profesional.
- ✓ Bantuan teknis dan pelatihan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). KPC mendatangkan seorang ahli air selama 1 thn, bekerjasama dgn PDAM. Untuk melakukan survey, mengevaluasi dan melakukan pelatihan pengelolaan air bersih.
- ✓ Hasil akhir program diharapkan dapat menciptakan PDAM yang mandiri dan menguntungkan.

2) Keterampilan Perempuan

- ✓ Merupakan program pemberdayaan SDM di level rumah tangga.
- ✓ Merupakan sarana bagi para perempuan untuk menyalurkan hobi dan mencari tambahan penghasilan.
- ✓ Kegiatan meliputi Pewarnaan alami menggunakan zat warna dari bahan-bahan alami, menjahit, kerajinan, dll.
- ✓ Bantuan dana berasal dari KPC dan masyarakat.

- 3) Pemberdayaan di bidang pendidikan melalui program LINGKAR – Masyarakat peduli pendidikan
 - ✓ Terbentuk dari berbagai latar belakang profesi yang secara sukarelawan melakukan hal kecil untuk meningkatkan pendidikan guru, dosen, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan karyawan.
 - ✓ Program berupa Taman Bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Dialog Interaktif di Radio GWP "Celoteh Pendidikan" tentang isu pendidikan, Peningkatan kapasitas pendidik melalui pembelajaran aktif, mendongeng, teknik penulisan ilmiah.
 - ✓ Bantuan dana dan buku berasal dari KPC, Pemkab, Organisasi sosial, dan donatur individu.
 - ✓ Keuntungan : Para volunteer mendapatkan ilmu, masyarakat pun dapat menuntut ilmu.

- 4) Pengembangan Agribisnis
 - ✓ Meningkatkan potensi pertanian dan pertumbuhan ekonomi lokal
 - ✓ Kegiatan Pemberdayaan SDM untuk Petani meliputi pembibitan & pengembangan jeruk, coklat, pengawasan, pelatihan, pemasaran.
 - ✓ Diadakan juga Lomba Asah Terampil setiap tahun, mirip Kelompencapir. Program ini memacu para petani untuk belajar, memberikan bacaan kepada para petani.

- 5) Pemberdayaan dalam bidang kesehatan yaitu Program pengendalian TBC (Tuberkulosis)
 - ✓ Merupakan kesepakatan 3 pihak antara Dinas Kesehatan, PT KPC, dan Puskesmas Bengalon dan Sangatta
 - ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana program
 - ✓ Memberikan pelatihan kepada 150 org kader Posyandu dan masyarakat bertindak sebagai PMO (Pengawas Menelan Obat)
 - ✓ Supervisi dan monitoring program dengan pihak yang terlihat 3 bulan sekali

Kesimpulan :

- 1) Sebagai daerah yang relatif baru, Kutai Timur perlu didukung oleh SDM yang berkualitas.
- 2) Pemberdayaan SDM di sekitar tambang akan meningkatkan daya saing dengan daerah lain.
- 3) SDM yang berkualitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
- 4) Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berdasar pada SDA yang berbarukan. Tidak perlu menggantungkan diri kepada batubara – karena memiliki umur terbatas.

Beberapa Sertifikat Penghargaan yang pernah diterima oleh PT. KPC :

- ✓ 2005 CSR Awards
- ✓ Social Empowerment Award dari Menko Kesra
- ✓ Penghargaan dari Departemen Kehutanan, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam thn 2005
- ✓ Penghargaan Community Development Innovative Competition dari Indonesia Development MarketPlace thn 2005
- ✓ Penghargaan Keselamatan Pertambangan, Upakarti Aditama selama beberapa kali

- ✓ Sertifikat PROPER Emas Kalimantan Timur selama 8 thn berturut-turut sejak thn 1999-2007. Tahun ini KPC merupakan satu-satunya perusahaan yang mendapatkan penghargaan ini.

***b. Presentasi II: Drs. H. Awang Faroek Ishak, Bupati Kutai Timur
Business Sector's Involvement on Community Empowerment Programs in
Kabupaten Kutai Timur***

Millenium Development Goals (MDGs)

- 1) Eradicate extreme poverty and hunger
- 2) Achieve universal primary education
- 3) Promote gender equality and empower women
- 4) Reduce child mortality
- 5) Improve maternal health
- 6) Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
- 7) Ensure environmental sustainability
- 8) Develop a global partnership for development

Kemiskinan merupakan masalah yang serius dan menjadi isu global, sehingga menjadi salah satu sasaran penting dalam pembangunan millennium/MDG, kita mempunyai target untuk menurunkan penduduk miskin menjadi setengahnya tahun 2015.

Yang dimaksud dengan Kemiskinan adalah :

- ✓ Jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas
- ✓ Kurangnya lapangan kerja
- ✓ Kesulitan membiayai kesehatan
- ✓ Kurangnya akses ke pelayanan publik
- ✓ Kurangnya perlindungan terhadap keluarga
- ✓ Kurangnya tabungan
- ✓ Tidak adanya investasi
- ✓ Kurangnya jaminan sosial

Jutaan rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan layak akan :

- ✓ Sandang
- ✓ Pangan
- ✓ Papan

Banyak masyarakat kita yang belum memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur yang memadai.

Di Kalimantan Timur sendiri angka kemiskinan cukup besar, walaupun terkenal dengan natural resources yang demikian besar dan kaya, tetapi ironisnya penduduknya masih miskin yaitu sebanyak ± 561.023 jiwa (18,7%). Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 5% pada 2009.

Belum teratasinya masalah kemiskinan, apakah mungkin karena program pembangunan selama ini masih belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan ? Saya banyak menghadiri pertemuan-pertemuan dengan berbagai parpol, organisasi, para pakar, seminar, dsb. Saya melihat bahwa negara kita belum fokus untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, masing-masing sektor dengan gaya sendiri, program sendiri-sendiri, belum pernah duduk bersama-sama berbicara untuk menyelesaikan masalah ini melalui program bersama. Menurut saya dengan 1

komando yang tegas kita dapat mengatasinya dengan lebih baik. Derapa besar tilyun dana yang sudah dikeluarkan tetapi hasilnya angka kemiskinan tidak turun juga. Ada beberapa kabupaten yang memiliki APBD tinggi, tetapi angka kemiskinan juga bertambah. Oleh karena itu mungkin dengan adanya Indonesia Business Link kita dapat sama-sama bergerak, menghadirkan tokoh-tokoh, membicarakan penanggulangan masalah kemiskinan.

Serangkaian jurus dan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini lebih berorientasi kepada material dibanding upaya pemberdayaan (empowering) dengan membangun inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Saya tidak setuju dengan BLT karena BLT tidak mendidik. Contoh kasus : ada suatu daerah, oleh BPS hanya mencatat 87 org miskin, tetapi didemo minta dimasukkan 360 org miskin supaya mendapat BLT. Untuk mengatasi kemiskinan cari cara yang lain, jangan dengan BLT – berikanlah pancing, jangan berikan ikan.

Persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan bermatra ganda (multidimensional) ini tidak dapat hanya dibebankan pada pemerintah daerah, tetapi harus menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat termasuk perusahaan. Jangan semata-mata mengharapkan Pemda sebagai satu-satunya, tetapi harus menjadi tanggung jawab kita semua.

Kualitas hidup masyarakat di sekitar tambang dan industri di Kutai Timur
Angka Pendapatan Perkapita, Rumah Tangga Miskin, Penduduk Miskin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran masih cukup tinggi dan semakin meningkat tiap tahunnya. Oleh karenanya pengentasan masyarakat miskin sekitar tambang dan industri juga menjadi tanggung jawab perusahaan melalui CSR.
Saya ingin membuat Peringkat bagi perusahaan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial – tidak hanya masalah lingkungan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dll.

CSR sebagai Investasi Sosial dan Etika Bisnis Global

CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development (The World Business Council For Sustainable Development, 2002)

- ✓ CSR dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan
- ✓ Praktik CSR yang berkelanjutan sebagai Investasi Sosial (Social Investment) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan
- ✓ Melaksanakan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan social akan meningkatkan nilai pemegang saham, dan berdampak pada peningkatan prestasi keuangan dan keberlanjutan perusahaan

Terus terang saya merasa heran dengan pendapat KADIN yang menyelenggarakan pertemuan beberapa waktu lalu dengan beberapa tokoh-tokoh pengusaha yang mengatakan bahwa CSR merupakan beban. Menurut saya itu bukan beban, tetapi untuk kepentingan perusahaan. Saya pernah bertanya pada beberapa perusahaan

seperti Newmont, Sinar Mas, Gudang Garam, dsb apakah mengeluarkan 5 juta US\$ merupakan beban bagi mereka, dan mereka menjawab tidak. Jadi dimana letak beban itu?

The Triple Bottom Line

- 1) Profit
- 2) People
- 3) Planet

Dengan CSR perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi tetapi juga keuntungan sosial, dan keuntungan sosial ini tak ternilai, dan saat ini CSR telah menjadi etika bisnis global. Contohnya : Kalau jumlah satpam di KPC bertambah banyak, artinya KPC gagal, tetapi kalau bertambah sedikit itu karena masyarakat yang jadi satpam.

Isu seputar praktek CSR

Praktik CSR

- ✓ Dana dalam jumlah besar telah dikururkan, manajemen CSR dibentuk, serta strategi dan program pembangunan nyata telah dilakukan perusahaan
- ✓ Fakta menunjukkan bahwa tuntutan, ketidakpuasan serta demo dari masyarakat dan aktivis LSM masih berlangsung
- ✓ Ada apa dengan CSR? Apa sekedar kosmetikkan praktik CSR yang dilakukan perusahaan? Apa perusahaan bertindak bagai sinterklas dengan dominasi kegiatan giving dan charity yang jauh dari membangun kemandirian? Atau mungkin, tuntutan masyarakat yang terlalu berlebihan?
- ✓ Diakui selama ini perusahaan, pemerintah dan masyarakat telah melakukan praktik CSR dengan caranya masing-masing dan seringkali ketiganya berjalan sendiri-sendiri, tanpa mencoba membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis

Ini telah terjadi dari tahun ke tahun.

Saya baru mengadakan kerjasama antara pemerintah Kutai Timur dan pemkot Balikpapan karena Balikpapan memiliki best practice yang bagus mengenai administrasi kependudukan. Karena mereka mempunyai hak paten ini maka saya mengajak staf ahli saya untuk membuat MOU mengenai ini. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kutai Timur, yang harus dibenahi dulu adalah administrasi kependudukan, tadinya yg 187ribu sekarang sudah berkembang menjadi 214ribu dan hari-hari ini masih trus berdatangan. Karena memang kami ingin menciptakan iklim investasi di mana investor dapat terus berdatangan. Oleh karena itu saya mengharapkan CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini, mengaku telah melakukan banyak kegiatan CSR tetapi tidak pernah terbuka dengan pemerintah.

CSR merupakan peluang perusahaan untuk mewujudkan komitmen memberantas kemiskinan

- ✓ Perush memiliki tanggung jawab sosial terhadap pengembangan masyarakat melalui program CSR
- ✓ Dana CSR perusahaan yang bernilai milyaran rupiah merupakan peluang yang dapat disinergikan guna mendukung program peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan
- ✓ Persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan praktik CSR, sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan rakyat?

Kontroversi Dasar Hukum CSR

Belum adanya peraturan perundangan khusus tentang CSR tidak mematahkan semangat Pemkab untuk menata praktik CSR agar lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dalam Pasal 1 (5) UU No. 32 th 2004, otonomi daerah adalah : "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Peraturan perundangan lainnya :

- i. UU No. 25 Thn 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, mengarahkan Industri di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral agar prioritas kepada usaha yang mendukung community development; -- Itulah yg dimaksud CSR.
- ii. UU No. 22 Thn 2001 tentang Minyak dan Gas bumi (pasal 40 ayat 5) berisikan kewajiban industri ekstraksi untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat;
- iii. UU No. 10 Thn 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bab X Pasal 53 (partisipasi masyarakat) menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan daerah.

Ini berarti daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk peluang untuk memanfaatkan secara optimal program Community Development (CD) / Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan daerah.

Atas dasar peraturan perundangan ini dan dengan semangat membangun dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera dan mandiri melalui CSR, dibuat PERBUP No. 10/02. 188.3/HK/VII/2006 tentang PEDOMAN PENERAPAN CSR DI KUTAI TIMUR.

Mis : Pemerintah ingin membangun jalan sepanjang 10km, tetapi dana yang ada hanya untuk 6km, 4km dapat dibantu oleh CSR perusahaan.

Contoh kedua, pengembangan pendidikan, pemerintah membangun gedung, mungkin lab-nya dibantu perusahaan, atau membantu kekurangan guru di daerah pedalaman.

Dengan cara ini, tidak akan terjadi overlapping yang ditakutkan karena program dijalankan bersama-sama dengan pengertian yang baik.

Karena itu di Kutai Timur kita membangun forum multistakeholder CSR, sebagai sebuah pilihan membangun hubungan harmonis yang berkelanjutan. Forum Multistakeholder ini terdiri dari PEMKAB KUTIM, MUSPIDA, DPRD, BPD, KADINDA, Perusahaan, LSM, Lembaga donor, Media, Masyarakat Lokal.

Dengan niat yang tulus ikhlas multi-pihak berikrar memperbaiki Praktik CSR agar lebih baik.

Kami membuat kesepakatan multistakeholder menuju penerapan CSR yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Lima Langkah strategis :

- 1) Membangun Forum MSH-CSR Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, dan memantau serta mengevaluasi penerapan CSR.
- 2) Mengembangkan sistem & mekanisme penerapan CSR yang cepat, mudah dan sederhana dengan mengedepankan program dan kegiatan CSR yang langsung menyentuh masyarakat, berdimensi jangka panjang dan berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan sistem perencanaan CSR terpadu dan transparan melalui Lokakarya / Musyawarah Perencanaan yang khusus dilakukan untuk merumuskan program CSR tahunan, dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Kutai Timur.
- 4) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel agar dapat lebih cepat dan efektif mendeteksi dan menindaklanjuti setiap penyimpangan yang terjadi, serta menjamin efektivitas sasaran dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.
- 5) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan CSR dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi bersama-sama pemerintah dan corporate.

Tujuan Forum MSH

Dengan forum dan pelibatan stakeholder akan:

- 1) Terbangun suatu wadah yang memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR; dan
- 2) Mampu menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR.

Sistem & Mekanisme Perencanaan CSR

Secara bottom-up – Konsultasi, koordinasi & sinkronisasi – Usulan/Proposal masyarakat atas inisiatif perusahaan – Alur usulan program pembangunan ke pemerintah melalui media MUSRENBANG.

Jadi masyarakat boleh mengusulkan, usulan ditampung, mana yang dibiayai oleh APBD dan mana yang dibiayai melalui CSR, bisa disinkronkan.

Rapat Koordinasi CSR sebagai komponen sistem perencanaan pembangunan daerah. Di bawah koordinasi Forum MSH_CSR, semua perusahaan wajib menyampaikan program CSR secara jelas. Apa kegiatannya, di mana tempatnya, berapa dananya dan apa manfaat yang dicapai? Untuk kemudian bersama-sama DPRD dan komponen masyarakat serta LSM disyahkan menjadi Program CSR Kab. Kutai Timur.

- ✓ CSR bukan sedekah, bukan charity, membebaskan masyarakat dari sifat peminta-minta. CSR menjadi keharusan. Mis 2,5% menurut agama Islam. Saya juga menerapkan 2,5% dari APBD diserahkan untuk rakyat miskin.
- ✓ Program, dana dan cakupan wilayah praktik CSR disinergikan dengan program pembangunan daerah dengan prioritas pada pengembangan sumberdaya manusia, menanggulangi kemiskinan, dan masalah keterbelakangan lainnya.
- ✓ Mendorong pelibatan dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik
- ✓ Mendorong praktik CSR yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)

- ✓ Memudahkan dalam mengukur keberhasilan praktik CSR yang dilakukan korporasi.

Arahan program prioritas CSR

Selalu berbicara masalah Triple track strategy (Pro Growth, Pro Empowerment, Pro Poor), Kebijakan Pembangunan difokuskan pada infrastruktur, SDM, dan pertanian, selanjutnya masuk ke grand strategy – itulah program CSR.

Perush tidak harus menyumbang uang tetapi bisa juga melalui bibit2, mis jagung, kedelai, dll.

Kesimpulan :

Program CSR harus mampu menjawab kebutuhan rakyat dengan prioritas kepada program K5 sbb :

- 1) Peningkatan kualitas KEIMANAN dan KETAKWAAN
- 2) Mengurangi KEMISKINAN
- 3) Memberantas KEBODOHAN
- 4) Menciptakan KESEMPATAN LAPANGAN KERJA
- 5) Meningkatkan KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

Sebagai wadah multi-pihak, Forum MSH_CSR ini diharapkan mampu berperan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR yang :

- ✓ Lebih baik
- ✓ Pro Rakyat
- ✓ Berkelanjutan

Pada tahun 2006 saya pernah mengajukan kepada DPR agar CSR dijadikan pemasukan daerah sebagai sumbangan pihak ketiga. Kami punya dasar bahwa APBD harus jelas penerimaan, setelah diajukan ke propinsi dan diperiksa oleh BPKP, BPK dsb tetapi dikatakan jangan dimasukkan di APBD kalau uangnya tidak masuk ke Pemda. Saya tahu bahwa ada kendala dari perusahaan jika uang tsb masuk ke Pemda yaitu kekhawatiran kalau dana tsb digunakan untuk yang lain. Padahal maksud sebenarnya adalah dana CSR tsb dimasukkan ke sana (APBD) supaya kita bisa sama2 bisa transparan. Pemerintah dituntut untuk menghasilkan Good Governance, tetapi pemerintah juga bisa menuntut perusahaan untuk melakukan Good Corporate Governance. Jadi tidak berlebihan sebenarnya. Tata kelola CSR itu harus terbuka. Jadi kalau mau nyumbang, katakanlah berapa sumbangannya, dikenalkan saja, jadi DPRD bisa memonitor, apakah benar dibangun jembatan, tempat ibadah, dsb.

Terlepas dari semua itu yang paling penting adalah melalui forum CSR, setiap tahun kita bertemu, perusahaan transparan.

Dengan tata kelola CSR yang lebih baik (partisipatif, transparan, akuntabel), semua komponen masyarakat dapat mengontrol denyut praktik CSR. Tidak ada lagi 'kebohongan' dalam praktik CSR.

Masyarakat tidak perlu demo lagi karena semuanya transparan.

Beberapa Program CSR KPC di KuTim :Perbaikan RS, Pembangunan jalan (bagian dari bargain bisnis), Upgrading airport, dsb. Program2 seperti ini makin menyenangkan masyarakat dan akan membuat masyarakat mencintai KPC.

Mimpi saya th 1999, saya menginginkan KPC membangun, rumah permanent, sekolah, kantor permanen. Dan telah dimulai dengan pembangunan sekolah permanen yang disumbangkan untuk masyarakat yang akan diresmikan tgl 8 ini. Dengan semua ini diharapkan Perusahaan dapat menjadi kebanggaan.

Forum seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia dan mudah-mudahan forum ini bisa dijadikan benchmarking bagi daerah yang lain.

Moderator : Ibu Danie

Mengatakan bahwa warga Kutai Timur sangat beruntung memiliki Bupati seperti Bpk Awang Faroek yang memiliki visi untuk mengentaskan kemiskinan terutama ketika melihat banyaknya sda yang ada namun tingkat kemiskinan yg cukup tinggi. Karena inilah Bpk Awang Faroek sangat concern dalam membangun kerjasama 3 pihak antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Dengan konsep Multistakeholder yang dimiliki oleh Bpk Awang Faroek, CSR tampaknya terlalu kecil untuk ide yang jauh lebih besar ini. Karena itu mungkin CSR lebih tepat diganti dengan MSR – Multistakeholder Social Responsibility untuk mendapatkan peran yang berimbang.

Ibu Danie juga menginformasikan sesi group discussion yang akan dilaksanakan setelah makan siang di mana sangat diharapkan partisipasi aktif dari semua peserta yang ada. Dan semua input yang masuk dalam sesi diskusi interaktif ini akan dikompilasi dalam serial buku yang akan diterbitkan oleh Indonesia Business Links.

***c. Presentasi III: Priyo Pribadi, Indonesian Mining Association
Peranan Asosiasi Dalam Peningkatan Kualitas Program CSR Perusahaan Tambang***

Bpk Priyo Pribadi mendahului pernyataan dengan sentilan dari Bpk Awang Faroek mengenai acara Kadin. Saya menghadiri pertemuan para tokoh asosiasi yang diselenggarakan oleh Kadin tsb. Ketika itu kita tidak setuju bukan dengan CSR-nya, karena CSR-nya sendiri telah kita dilakukan, bahkan tanpa disuruh. Yang tidak disetujui adalah ketidakadilan karena itu hanya dikenakan pada perusahaan yang mengelola SDA. Ada perbedaan antara corporate yang berusaha di bidang sumber daya alam dan corporate di bidang lain. Dan hal yang lainnya adalah mengenai formula CSR yang belum jelas, dan sekarang sudah ada pendekatan, diwujudkan dalam PP yang jelas, sehingga sewaktu menjalankan program CSR sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. CSR sifatnya kewajiban perusahaan kepada masyarakat, tetapi tentunya tidak memberatkan sehingga dapat bersama-sama membangun daerah.

Maaf kepada Bpk Awang jika terkesan berlebihan reaksi dari para asosiasi di Jakarta, karena mendapat peraturan baru tersebut, karena sebenarnya hal-hal telah kita lakukan dan ketika hal itu menjadi sesuatu yang disuruh maka timbul suatu rasa yang tidak mengenakkan. Tetapi yang perlu ditekankan adalah bahwa kita tidak anti CSR.

Yang ingin saya sampaikan sebenarnya banyak hal telah banyak dilakukan oleh perusahaan di daerah, dalam hal ini Asosiasi perusahaan pertambangan hanya merupakan kumpulan dari perush yang mencoba menterjemahkan CSR supaya bisa dijalankan di tiap daerah. Apa yang ingin saya sampaikan ini mungkin terlihat seperti menggarami laut karena KPC telah melakukan jauh lebih hebat daripada yang

Asosiasi lakukan, dan merupakan salah satu contoh yang baik, terlebih dengan dukungan dari Bupati setempat.

SDA merupakan salah satu yang memang menjadi modal pembangunan. Jadi kalau ada kemiskinan yang harus diturunkan, maka salah satu cara untuk menurunkan kemiskinan adalah dengan menaikkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam. Karena dengan mengelola SDA kita menggali dan mendapatkan nilai yang baku dan sebagian hasilnya dapat kita gunakan untuk membangun negara. Di dalam pelaksanaan penggalian SDA ini kita menganut pada UUD '45 pasal 33 (3).
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Pasal 33 (3) UUD '45 ini mengandung 2 amanah dalam hubungannya dengan kegiatan pertambangan umum, yaitu :

- 1) Sumberdaya alam dalam hal ini bahan galian mineral, dikuasai negara
- 2) Bahan galian mineral tersebut harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah sumber galian mineral dikuasai oleh negara, dan siapapun yang menemukan mineral, bukanlah milik pribadi, tetapi milik negara. Kalau kita diberi tugas atau kuasa untuk menggali, itu artinya cuma untuk menggali saja, ketika sudah digali harus dijadikan modal atau pendapatan suatu negara dan sebagian untuk masyarakat – yaitu amanah yang kedua dari pasal 33 (3) yaitu untuk kemakmuran rakyat.

Pembangunan berkelanjutan

Industri tambang, pemerintah & masyarakat bersama-sama melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Walaupun masing-masing pihak ada kepentingan sendiri-sendiri tetapi kepentingan bersama inilah yang harus kita fokuskan.

Komoditi pertambangan merupakan komoditi yang tidak bisa diperbarui, dan berpotensi merubah lingkungan.

Mis : untuk mengeluarkan emas dari dalam bumi hanya bisa dengan cara digali, tidak bisa hanya doa-doa dsb.

Karena itu industri tambang mendapat sorotan keras karena mengubah lingkungan. Karena itu kita harus mengubah lingkungan dengan resiko sekecil mungkin dan pengelolaannya harus baik dan bertanggung jawab dari sejak awal.

Selama ini kita telah melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam Industri Tambang:

- ✓ Industri pertambangan sudah menjalani masa lebih dari 30thn sejak diberlakukannya UU No 11 th 1967. UU yang lama terlalu 'mengenakkan, tetapi UU yang baru sudah mulai dikoreksi. Dan perusahaan-perusahaan yang datang ke Indonesia sudah mulai menyadari adanya kepentingan bangsa Indonesia yang harus diperhatikan. Masyarakat harus menerima kehadiran perusahaan dengan baik, tidak seperti dulu, perusahaan merupakan tempat yang sangat eksklusif di suatu daerah sementara daerah sekitarnya belum modern. Dan sekarang perusahaan harus menyatu dengan masyarakat sekitar.
- ✓ Beberapa usaha pertambangan telah memasuki tahap pasca tambang dan harus membuktikan dirinya sebagai usaha tambang yang sustainable.

- ✓ Diberlakukannya UU otonomi daerah memberikan tanggung jawab lebih besar pada daerah dalam hal pengembangan wilayah. Komunikasi antara industri dan daerah harus lebih baik karena daerah lah yang akan menentukan arah pengembangan industri. Sementara itu kualitas SDM belum memadai.
- ✓ Dampak dari proses globalisasi, perhatian khusus pada lingkungan, demokratisasi, HAM, dsb. Perusahaan-perusahaan tambang tidak boleh mengabaikan ini, harus memperhatikan. Adanya demonstrasi, pemogokan dsb karena kurang harmonis, karena itu harus disesuaikan.

Pradigma baru dalam Industri Pertambangan

Harus memperhatikan :

- Pencegahan dan pengendalian pencemaran
Industri mengintegrasikan pencegahan dan pengendalian lingkungan dari awal perencanaan
- Hak dan kewajiban
Regulator/pemerintah dan industri menghormati hak dan kewajiban masing-masing.
- Kemitraan dan kerjasama
Standard ditetapkan bersama-sama. Pada waktu operasional tidak lagi berada dalam posisi masing-masing, tetapi sudah menyatu. Contohnya di Kutim melalui forum seperti ini, kemitraan menjadi kuat.
- Saling ketergantungan
Semua pihak terkait dalam industri saling membantu dan mengisi.

Masa Depan Industri Pertambangan

Diharapkan tergantung pada kebijakan yang berimbang antara kepentingan nasional dan kemampuan permodalan, sehingga tercapainya kemakmuran dan keadilan.

Kepentingan nasional tentunya kebijakan pemerintah, regulasi, dsb dirumuskan oleh pemerintah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan permodalan, karena pemerintah belum mampu membuka penambangan sendiri, maka ada perusahaan yang dilibatkan.

Jadi waktu sebuah industri masuk ke suatu daerah, di dalam benaknya ada suatu transformasi bahwa sumber daya alam yang digali itu nantinya akan menjadi kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat. Transformasi inilah yang salah satunya menjadi CSR.

Pokok Permasalahan

Industri pertambangan dengan ciri padat modal dan padat teknologi yang berlokasi di daerah terpencil dengan areal yang luas, telah menimbulkan kesan eksklusif dan terkesan mengambil jarak dengan masyarakat setempat.

Ada banyak contoh tambang-tambang eksklusif di mana orang lain tidak bisa masuk. Sebenarnya kalau ada larangan masuk ke suatu daerah tambang seperti itu, maksudnya adalah agar supaya masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan mengenai tambang dan bahaya-bahaya-nya tidak menjadi korban, tetapi seharusnya tidak eksklusif.

Kerjasama Segitiga

Kerjasama yang diharapkan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus memiliki kerjasama yang erat di mana pemerintah adalah pengawas penegakan hukum, perusahaan harus transparan/ akuntability. Jangan sampai ada informasi

mengenai SDA yang dikirim ke luar negeri, tanpa sepengetahuan kita berapa besarnya, dsb.

Antara pemerintah dan perusahaan menyangkut masalah pajak, revenues, job creation, dsb. Sedangkan antara perusahaan dan masyarakat ada CSR dan Good Corporation Governance. Dari sisi perusahaan menyangkut production, optimalization, environment. Sedangkan dari sisi masyarakat menyangkut community development dan Empowerment, jadi masyarakat tidak hanya jadi penonton tetapi juga terlibat. Jikalau sebuah industri masuk ke suatu daerah, industri tsb harus mengajak masyarakat sekitar, dan apabila dirasakan bahwa masyarakat belum mampu maka harus diadakan pelatihan-pelatihan.

Dari evaluasi yang dilakukan oleh Asosiasi, tambang yang telah dilaksanakan selama puluhan tahun belumlah sempurna. Dari berbagai sorotan dan koreksi terhadap industri tambang haruslah diambil langkah-langkah perbaikan, di antaranya:

- ✓ Transformasi untuk kemakmuran dan keadilan
- ✓ Peningkatan peran bangsa Indonesia
Untuk perusahaan-perusahaan di daerah terpencil dengan penanaman modal asing, sudah banyak orang Indonesia yang bekerja bahkan sampai tingkat management atas. Tetapi masih banyak masyarakat lokal yang belum mendapat pekerjaan. Hal ini akan menjadi masalah jika tidak ada langkah perbaikan.
- ✓ Percepatan pembangunan di daerah tertinggal
- ✓ Penyediaan lapangan kerja terlatih
- ✓ Meningkatkan peran masyarakat setempat
- ✓ Menjadikan kegiatan pertambangan sebagai motor penggerak pembangunan daerah
- ✓ Memperkecil dampak lingkungan
- ✓ Meningkatkan upaya pemeliharaan lingkungan
- ✓ Pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Definisi CSR

CSR – Corporate Social Responsibility, is a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources. (Philip Kotler)

Kewajiban perusahaan kepada masyarakat memang harus ada, tetapi juga harus sesuai. Kewajiban social kepada masyarakat yang terutama sebenarnya bukanlah dari perusahaan tetapi dari pemerintah. Tetapi perusahaan yang bekerja di daerah itu perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah supaya kemakmuran masyarakat setempat dapat tercapai.

Corporate Social Responsibility

- ✓ Merupakan tanggung jawab social perusahaan di luar kewajiban-kewajiban pajak, dll.
- ✓ Bertujuan membangun pagar pengaman social dari masyarakat lingkaran tambang terhadap tuntutan-tuntutan; ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman tumbuh, penghentian hak guna lahan, pencurian, dll. CSR sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan akan dilindungi.
- ✓ Pengorganisasian dapat oleh perusahaan namun lebih baik oleh lembaga pemberdayaan masyarakat lingkaran tambang sehingga terjadi proses "empowerment". Ada beberapa perusahaan yang membentuk lembaga yang menjembatani antara perusahaan dan masyarakat. Ada juga masyarakat yang berinisiatif membentuk lembaga sendiri.

Ada perusahaan yang telah lama melakukan CSR, tetapi belum produksi. Ada perbedaan antara Oil company dan Mining Company. Pada Oil company semua dana diganti, tetapi dalam Mining Company, dalam pengeksplovasian tambang, telah banyak community development dan CSR yang dilakukan dari uang sendiri, walaupun belum produksi.

Integrasi CSR

Pada waktu mendesign sebuah tambang, kita juga harus berpikir bagaimana menutup tambang. Ada beberapa tambang contohnya di Kalsel. Mereka membuka tambang tetapi tidak memiliki planning bagaimana menutupnya. Hal-hal seperti inilah yang berbahaya karena nantinya akan menjadi bom waktu, pada waktu tambang berhenti, masyarakat belum makmur, belum ada fasilitas infrastruktur, yang terjadi adalah kerusakan alam, ini yang harus dihindarkan. Pada saat tambang ditutup, masyarakat setempat sudah harus mandiri, dan bagaimana supaya mandiri maka harus adanya komitmen lingkungan (pemulihan hutan produksi, pemulihan hutan lindung, konservasi alam, pengelolaan dam tailing) dan komitmen sosial ekonomi (mata pencaharian alternative yang lestari, pelibatan masyarakat dan karyawan, peluang kerja, dukungan ke pembangunan daerah). Ini harus dibicarakan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Di manakah industri pertambangan di Indonesia dapat berperan.

Di samping menggali sumber daya alam, industri juga harus melakukan community development dan harus melakukan transformasi kekayaan alam ini menjadi suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Tambang ini ada di mana-mana di seluruh Indonesia, dan apabila semuanya dapat melakukan CSR dan community development akan sangat membantu pemerintah. Dengan jumlah kekayaan tambang yang dapat dihitung dengan sejumlah milyar ton yang dihasilkan seharusnya dapat ditransformasikan kepada berapa banyak rakyat yang dapat disejahaterakan.

Pembinaan dan Penghargaan Com-Dev

Sebagai Asosiasi memiliki tolak ukur bagaimana perusahaan telah melakukan CSR. Asosiasi ingin membuat CSR sebagai standard yang dapat diterima di mana-mana.

Ada 3 hal yang dilakukan yaitu :

- ✓ Pembinaan yang terus menerus dilakukan dengan berbagai workshop, pelatihan dan sosialisasi, dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang telah melakukan CSR maupun dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah itu sendiri.
- ✓ Dilakukan pendekatan kepada masyarakat lingkaran tambang dengan memperhatikan kebutuhan primer mereka.
Yang perlu diperhatikan adalah adanya perbedaan kebutuhan ini. Mis : Masyarakat yang tinggal di gunung jangan dibuatkan rumah, karena hidup mereka berpindah-pindah. Tetapi kalau di pantai, masyarakat hidup menetap. Hal seperti ini perlu di mapping terlebih dahulu.
- ✓ Penghargaan setiap 2 (dua) tahun dilakukan oleh team independen yang difasilitasi Badan Litbang ESDM. Di Indonesia ada PATMA AWARD yaitu penghargaan yang diberikan baik untuk pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang telah melakukan Community Development dengan baik. Penghargaan ini diberikan setiap 2 thn sekali. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden. Thn 2005 kemarin dan tahun 2007 ini juga, di bulan Agustus mendatang.

Latar belakang pemberian penghargaan

- ✓ Menerapkan program pengembangan masyarakat secara lebih sistematis
- ✓ Terciptanya tanggung jawab sosial korporat (CSR) terhadap komunitas lokal untuk berkomitmen dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan
- ✓ Memupuk tanggung jawab seluruh stake holder di dalamnya termasuk unsur pemerintahan dan masyarakat itu sendiri
- ✓ Pengembangan masyarakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani (civil society) yang mandiri secara berkelanjutan
- ✓ Penghargaan sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap suatu prestasi istimewa yang dipersembahkan kepada siapapun

Tujuan dari apresiasi ini adalah terwujudnya kesadaran para stake holder sektor ESDM akan pentingnya pengelolaan potensi energi dan sumberdaya mineral yang bersih lingkungan dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Azas : Menciptakan good governance di lingkungan industri ESDM dan memberi motivasi kepada warga Masyarakat, Korporat, dan Pemerintah Daerah di sekitar wilayah kerja sektor industri energi dan sumberdaya mineral untuk memberikan kontribusi dan karya terbaiknya.

Ruang lingkup

- 1) Community Service: pelayanan untuk memenuhi kepentingan masyarakat/umum.
- 2) Community Empowering: adalah program untuk membantu kemandirian masyarakat.
- 3) Community Relation: kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi dengan para pihak yang terkait.

Kriteria Penilaian CSR

- ✓ Memberikan kontribusi yang besar dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi pada bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi
- ✓ Menerapkan skala operasi meliputi dana, sarana, SDM, manajemen, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya
- ✓ Menjadi pionir dan secara konsisten menerapkan konsep Pengembangan Masyarakat di korporat

Kriteria program CD untuk Korporat

Dari nara sumber yang meliputi Pemda, Korporat, Masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat, kita ingin CSR betul-betul menyatu, bukan sekedar charity/donasi.

- 1) Sustainable/Kemandirian 40%
- 2) Partisipasi dan Kesesuaian Program dengan kebutuhan masyarakat 25%
- 3) Menumbuhkan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, infrastruktur 25%
- 4) Charity/Donasi 10% -- nilainya kecil

Diharapkan perusahaan-perusahaan memilih program-program CSR yang dapat berlanjut.

Contoh kasus:

Nusa Halmahera, mayoritas penduduk adalah nelayan, tetapi pohon kelapa begitu banyak di sepanjang pantai. Dibantu pabrik es, bisa untuk menyimpan ikan, tetapi tidak ada yang memperdulikan kelapa, tidak terlalu bermanfaat. Kemudian Perusahaan di sana membuat pabrik processing kelapa menjadi minyak dan ada pabrik pembuatan santan. Jadi, kelapa-kelapa yang sudah tua dijadikan minyak sementara kelapa-kelapa yang masih muda dijadikan santan kemudian di pack dan dikirimkan ke daerah lain. Jadi ada nilai tambah yang diberikan. Dan apabila tambang sudah selesai, masyarakat dapat melanjutkan dengan unit-unit lain di sekitarnya.

Pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk community development.

Important contributor to Indonesian economy

- ✓ Regional and Community Development + donations menempati angka.
- ✓ Total direct employees
- ✓ Total government revenue
- ✓ % of Indonesian GDP
- ✓ % of exports (US\$14,272 million)

Dari data survey PWC, dari hasil industri pertambangan sebagian besar 52% merupakan pendapatan Negara, dan menempati urutan kedua adalah belanja barang dalam negeri 34%. Ini dimaksudkan jika perusahaan membelanjakan sesuatu, prioritaskanlah dari daerah tersebut sehingga manfaat bagi daerah setempat langsung dirasakan, ada pertumbuhan ekonomi, tetapi memang tidak semua barang bisa didapat di daerah. Daerah harus menyadari bagaimana dapat menyediakan kebutuhan perusahaan.

CSR adalah salah satu pendukung keberhasilan industri pertambangan

- ✓ Industri pertambangan adalah lokomotif pembangunan wilayah (engine of development)
Industri pertambangan adalah industri yang ada di daerah-daerah terpencil, tidak hanya menggali, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah tsb.
- ✓ Indonesia memiliki prospek mineral dan bahan galian industri yang luar biasa
- ✓ Industri pertambangan masih sangat berpotensi menyumbangkan devisa Negara
- ✓ Pembangunan industri pertambangan harus semakin memperhatikan masalah lingkungan dan pengembangan masyarakat
- ✓ Persaingan usaha menyebabkan pesatnya kemajuan teknologi di bidang pertambangan yang membutuhkan SDM tangguh

Indikator Keberhasilan CSR

1. Indikator keberhasilan internal dapat diukur sbb:
 - a. Kebijakan perusahaan tentang Com-Dev
 - b. Institusionalisasi kebijakan dalam organisasi
 - c. Program Community Development dan alokasi biaya
 - d. Kinerja atau output yang dihasilkan program
2. Indikator keberhasilan external:
 - a. Tingkat partisipasi program, mulai dari rencana implementasi, hingga monitoring dan evaluasi

- b. Tingkat kemandirian masyarakat
- c. Keberlanjutan (sustainability dari program)

Gambaran Pelaksanaan Com-Dev di beberapa Industri Pertambangan

- ✓ Di Irian – Membentuk lembaga, ada perwakilan dan Working Groups yang bersama-sama menjalankan perencanaan penutupan tambang sekaligus community development
- ✓ Yayasan yang dibentuk Perusahaan
- ✓ Tempat rekreasi. Setelah tambang ditutup, dijadikan tempat rekreasi yang menarik untuk masyarakat sekitar dan dikelola oleh Yayasan.
- ✓ Alternatif lain reklamasi tambang adalah untuk peternakan ikan
- ✓ Di wilayah Irian yang masih terpencil, para penduduk memang masih harus mendapat banyak pelatihan. Tambang begitu besar tetapi masyarakat masih sedikit dan banyak diantaranya masih miskin

Tenaga Kerja di PT Freeport Indonesia

- ✓ Total Tenaga kerja thn 2004 : 18.692
- ✓ Tenaga kerja Indonesia : 18.181
- ✓ Expatriates : 511

Di Irian sekarang sudah mulai banyak orang bertani, yang sebelumnya mereka tidak pernah bertani, juga peternakan jamur.

Demikianlah beberapa gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan Industri pertambangan maupun bagaimana Industri pertambangan melakukan pembinaan, penilaian, dan penghargaan pada bidang-bidang yang menjalankan CSR dengan baik.

Moderator: Danie Prakosa

Moderator Ibu Danie menambahkan hal yang disinggung di awal oleh Bpk Priyo mengenai CSR yang diwajibkan dalam UU PT, Pasal 74. Pada acara tgl 16 July lalu sebetulnya merupakan inisiatif para Asosiasi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah mengapa sebaiknya aspek CRS dalam RUU PT ini perlu dipertimbangkan karena memang betul bukan karena kalangan Perusahaan tidak mau menjalankan CSR, banyak sudah contoh di mana CSR telah dilakukan namun banyak agenda-agenda yang perlu dibicarakan bersama dengan cara yang seksama. Salah satu keberatan lain adalah definisi CSR yang mungkin masih belum sama/seragam dipahami oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Seperti diketahui istilah CSR di Indonesia baru 6-7 thn belakangan ini berkembang cukup pesat. Istilah CSR pertama kali muncul di negara-negara barat khususnya di Amerika dan daratan Eropa.

CSR yang dikeluarkan oleh Bank Dunia thn 2007 menyebutkan bahwa CSR merupakan komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan maupun masyarakat umumnya. Inilah pendefinisian CSR menurut World Bank.

Bahwa pada akhirnya CSR ini merupakan jalur menengah (midterm) atau jalur panjang(longterm) dari intervensi sosial yang mereka lakukan tidak hanya kepada bisnis tetapi juga kepada agenda pembangunan berkelanjutan dan pada masyarakat

umumnya. Kalau kemudian ditanyakan kenapa CSR itu cenderung diwajibkan? Bagi dunia usaha kata 'wajib' tersebut menjadi berat/beban karena toh mereka juga melakukan karena mengacu pada akar CSR dari global discussion, CSR lebih mengacu pada aspek sukarela bukan wajib. Sukarela ini tentu saja bukan kepada Perusahaan kemudian tidak bertanggung jawab pada aspek-aspek sosial. Sukarela yang dimaksud di sini adalah beyond compliance. Banyak regulasi yang mengatur aspek-aspek CSR, apa sudah diformulasikan oleh team ISO 26000 yang membahas Social Responsibility, jadi sengaja kata 'Corporate' itu dilepaskan, karena jika kita bicara tentang tanggung jawab sosial itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab korporasi.

Aspek-aspek dalam CSR ini ada 7 :

- 1) Organizational Governance
Meliputi Inclusiveness, Ethical Conduct, Disclosure of Information, Respect for Rule of Law, Accountability. Di mana masing-masing faktor ini sudah ada regulasinya dan Perusahaan harus mengikuti regulasi yang ada.
- 2) Environment
Meliputi Pollution Prevention, Global Warming Prevention, Sustainable Consumption and Land Use, Preservation and Restoration of Ecosystems and Natural Environment, Respect for Future Generation.
- 3) Human Rights
Meliputi Civil and Political Rights, Economic, Cultural, and Social Rights, Fundamental Labor Rights, Community Rights.
- 4) Labor Practices
Meliputi Occupational and Health Safety, Dignified Working Conditions, Human Resources Development, Worker as A Human Being.
- 5) Fair Operating Practices
Meliputi Promotion of Ethical and Transparent Activities, Promotion of Free Competition, Application of Fair & Ethical Supply & After-Supply Practice, Respect for Intellectual & Property Rights & Respect for User's Interest, Fight Against Corruption
- 6) Consumer Issues
Providing Consumer with Accurate & Adequate Information, Provision & Development of Socially-Beneficial Services & Products, Protection of Consumers
- 7) Community Involvement/Society Development
Development Impacts, Community Involvement, Community Involvement, Philanthropy. Kalau kita lihat, aspek pengembangan masyarakat hanyalah sebagian dari konsep CSR secara keseluruhan.

Kalau kita lihat apa sih yang dipahami sebagai social responsibility pada tatanan global, inilah yang direnungkan oleh team ISO 26000 yang sekarang sedang menyusun rancangannya. Dan IBL sendiri sebagai salah satu Promotor CSR, kita selalu mendorong Perusahaan agar memperhatikan masyarakat sekitar, lingkungan, dan juga aspek-aspek yang terkait dengan good governance. Kita mempunyai 5 Pilar yang disebut dengan IBL Five Pillar, dimana di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh Perusahaan ketika mereka melakukan komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan yaitu Building Human Capital, Protecting The Environment, Encouraging Good Governance, Assisting Social Cohesion, Strengthening Economies. Salah satu pilar adalah topic yang hari ini kita diskusikan. Inilah sedikit gambaran mengenai CSR yang mungkin di Indonesia masih perlu lebih banyak disosialisasikan

1. Nasruddin, Sangatta

Pertanyaan :

- 1) Kontrak KPC yang berakhir 2021, berarti beberapa tahun lagi aktivitas tambang sudah tidak ada. Yang saya khawatirkan sekarang, langkah-langkah apa yang telah dilakukan pihak perusahaan ataupun dari pemda untuk mempersiapkan masyarakat dalam proses pengalihan aktivitas. Karena proses ini sangat tidak mudah untuk mengalihkan pola pikir dan pola perilaku masyarakat dari suatu pekerjaan yang dulunya digeluti. Bagi masyarakat yg sudah terbiasa bekerja di tambang dan sekian thn kemudian harus beralih ke pekerjaan lain, pastinya ada shock. Jadi perlu pola-pola khusus yg dilakukan & dipersiapkan dari sekarang
- 2) Dari presentasi IMA tadi ada beberapa contoh kasus yang telah mempersiapkan lembaga yang mengatur pembangunan dan di sekitar tambang, telah dipersiapkan segala sesuatunya. Apakah PT. KPC telah mempersiapkan itu ?
- 3) Bagaimana kalau dana CSR KPC disisihkan, mis 1% tiap tahun, utk dijadikan tabungan. Setelah tambang selesai th 2021, masyarakat punya tabungan/deposito yang dapat digunakan untuk pembangunan, seperti apa penyalurannya dapat dipikirkan bersama-sama.

Jawaban :

Sonny, KPC : Memang betul kontrak karya KPC berakhir thn 2021 namun bukan berarti tambang trus berhenti, tidak. Karena KPC mendapatkan kesempatan untuk memperpanjang kontrak, tapi memang kontrak di atas kertas yg dihadapi sekarang berakhir di 2021.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk penutupan tambang :

Pada thn 2004 bln Agustus kami telah membentuk Tim Terpadu Penutupan Tambang, terdiri dari pemerintah diwakili oleh dinas kesehatan, dinas pertanian, Bapeda, Kab, Provinsi, Pusat, KPC, Tomas. Team ini telah dibentuk 17 thn sebelum penutupan tambang dan karena hal ini salah satu anggota dari Dept. Lingkungan hidup berkata bahwa KPC sangat proaktif sekali. Memang Team ini belum disosialisasikan secara terbuka, tapi sudah ada dokumentasinya, dan memang merupakan PR bagi kami untuk bisa disosialisasikan ke pihak-pihak terkait.

Langkah-langkah yang dilakukan KPC sebenarnya sudah mengarah ke sana, KPC berkomitmen membuat program-program pemberdayaan SDM, pendidikan, kesehatan, dsb. Program-program tsb yg sesuai dengan moto kami yaitu pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya mengarah ke sana, bahwa suatu ketika tidak dapat lagi menggantungkan diri pada tambang.

Mengenai usulan sebagian dana CSR ditabung utk pasca 2021, sebenarnya dari kami memang tidak ada kebijakan untuk menabung karena dana CSR pada thn tsb harus habis pada thn itu juga. Tetapi sebenarnya sudah ada dana yang dialokasikan setiap tahunnya. Dept Energi & Sumber daya alam mensyaratkan tambang khususnya KPC & Freeport mengalokasikan sejumlah dana ke suatu account, yang baru bisa dipakai setelah tutup tambang.

2. Alfian, Sekjen Laskar Kebangkitan Kutai

Pertanyaan :

- 1) Dari penjelasan KPC, CSR yang dilakukan tsb untuk masyarakat atau untuk KPC? Karena dana tsb dikelola oleh KPC sendiri. Seperti penjelasan

Bpk Bupati mungkin lebih baik, kalau itu memang dengan KPC dengan ikhlas memberikan dana CSR tsb, kenapa tidak 100% diberikan untuk dikelola pemerintah, supaya lebih transparan.

- 2) Mengapa dana CSR tidak pernah menyentuh masyarakat asli Kutai, terutama kami sendiri juga merasakan, yang di dekat areal tambang, penduduk asli belum 100% menyentuh dana CSR tsb.

Jawaban :

Bpk Soni : Mengenai usulan dana CSR diberikan kepada pemerintah, jika dana tsb diberikan kepada pemerintah maka namanya bukan CSR lagi. Justru dengan dana yg dialokasi dan dikelola oleh perusahaan itu sendiri, itu menunjukkan dan bisa dinilai kalau perusahaan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan untuk memenuhi persyaratan di AMDAL.

Adanya indikasi bahwa dana tidak pernah menyentuh orang asli Kutai sebenarnya tidak benar. Salah satu contoh dari sekian banyak hal yg KPC lakukan, yaitu di bidang pendidikan . KPC memberikan beasiswa antara 100-200 tiap tahunnya kepada siapa saja termasuk orang Dayak, Kutai, dsb. Dan KPC memberikan keistimewaan, sekian persen utk orang Kutai, dsb. Contoh lainnya di bidang kesehatan, program pemberantasan Malaria ini diperuntukkan bagi semua orang. Tetapi kalau ada keluhan dari orang-orang yang tidak menerima, masalahnya adalah dana yg dialokasikan sebesar 5 juta US\$ atau sekitar 45 milyar rupiah, jumlah tsb belum bisa menjawab masalah secara keseluruhan. Mungkin memang benar ada yang tidak menerima, karena penduduk Kutai besar, lebih dari 70,000

Tanggapan :

Jika tambang selesai, para pekerja yang bukan penduduk asli, bisa pergi dengan mudah, pulang ke kampung halaman. Tetapi bagaimana dengan penduduk asli, di sinilah kampung halaman kami. Mungkin lahan bekas tambang dapat dibangun perkebunan dsb.

3. Suryan Ferdesa

Pertanyaan :

Mengenai CSR yang dilakukan KPC, selama ini transparansi belum terbuka untuk umum, di mana saja yg telah dilakukan. Sementara pemerintah juga sering kekurangan dana mis utk pembuatan jalan, dsb. Masyarakat Sangatta memang mengetahui bahwa tambang batubara ini terbesar di sini, tetapi kami tidak mengetahui seberapa jauh berdampak pada ekonomi. Baiklah kita bersama-sama, seperti Bpk Bupati telah mengalokasikan 20% dari APBD untuk pendidikan, jika ditambah dengan KPC yg juga memberikan dana pendidikan yg lebih lagi. Saya melihat dana pendidikan yg telah diberikan KPC lebih berorientasi pada orang luar dibanding masyarakat Sangatta. Contohnya saya selaku putra daerah, sedang mengambil pendidikan S2, hanya dibiayai oleh pemerintah, dan itu hanya sebagian, sebagian lagi darimana? Nah inilah harusnya kepedulian perusahaan, jika tambang selesai harus ada kekuatan dari orang-orang pribumi itu sendiri supaya bisa bersaing. Saya melihat kepedulian KPC dalam hal ini tidak ada. Apakah mungkin kami kurang pendekatan ?

4. Usulan bagi KPC : Koperasi adat Kutai memiliki Lahan untuk berkebun sawit 20,000 hektar, kami minta agar dana CSR dialihkan untuk berkebun sawit untuk pengadaan bibit, pupuk dsb.

Tanggapan Bpk. Awang Faroek

Area bekas tambang tidak akan dijadikan lahan, di Negara-negara maju lainnya seperti Denmark, Kanada, Australia, area bekas tambang dijadikan kota.

Masyarakat Sangatta hendaknya mempersiapkan diri, sekarang ini banyak perkembangan di area private sector, jangan hanya orang pendatang yang maju.

Untuk pengadaan bibit dsb tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh perusahaan, sebagian lainnya harus swadaya sendiri melalui kredit.

Conclusion Panel Session oleh Moderator

- ✓ Bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prakarsa-prakarsa CSR yang diharapkan dapat memberikan solusi pengentasan kemiskinan di tanah yang kaya akan SDA.
- ✓ Dunia usaha tambang perlu melakukan langkah-langkah persiapan bagi masyarakat di sekitar tambang jika pertambangan ditutup.

Presentasi Group :

Kelompok I

"Key Performance Indicators (KPI) in CSR Implementation"

Keberhasilan pelaksanaan program-program CSR di bidang Human Capital ditentukan oleh banyak aspek. Di bawah ini adalah sejumlah aspek penting yang dapat dijadikan indikator kunci guna menilai keberhasilan CSR:

(1) Leadership (Kepemimpinan)

- program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari top management perusahaan
- terdapat kesadaran filantropik (kesadaran tertinggi dari piramida CSR ala Carrol –pen) dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan program

(2) Proporsi / Alokasi Bantuan

- bukan semata-mata pada kisaran budget, tetapi pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka budgetnya harus lebih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila budget besar pasti menghasilkan program yang bagus.

(3) Transparansi dan Akuntabilitas

- terdapat laporan tahunan (annual report)
- mempunyai mekanisme audit sosial dan financil. (Audit sosial terkait dengan pengujian sejauhmana program-program CSR telah dapat di-*address* secara benar sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan feed-back dari masyarakat secara benar dengan melakukan interview dengan para beneficiaries).

(4) Coverage Area (Cakupan Wilayah)

- Terdapat identifikasi penerima manfaat (beneficiaries) secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.

(5) Perencanaan dan Mekanisme Monitoring-Evaluasi (Monev)

- Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan multistakeholder pada setiap siklus pelaksanaan proyek

- Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas (local wisdom), pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya-budaya lokal yang ada
- Terdapat blue-print policy yang menjadi dasar pelaksanaan program

(6) Pelibatan Stakeholder (Stakeholders Engagement)

- terdapat mekanisme koordinasi reguler dengan stakeholders –utamanya masyarakat
- terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek.

(7) Keberlanjutan (Sustainability)

- terjadi alih-peran dari korporasi ke masyarakat
- tumbuhnya rasa memiliki (sense of belonging) program / hasil program pada diri beneficiaries / masyarakat, sehingga masyarakat dapat me-maintain program dengan baik
- adanya pilihan partner program yang bisa menjamin bahwa tanpa keikutsertaan perusahaan, program bisa tetap dijalankan sampai selesai dengan partner tsb.

(8) Hasil Nyata (Outcome)

- Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan) atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan)
- Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat
- Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis
- Terjadi penguatan komunitas (community empowerment)

Kelompok II

“What is the valuable experience in transforming CSR policies into business operation?”

Berkaca dari pengalaman yang ada, terdapat berbagai hal yang dapat dilakukan guna mentransformasikan kebijakan CSR ke dalam operasi bisnis perusahaan, antara lain:

- Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk merancang program-program yang akan dilaksanakan
- Kesenjangan yang terjadi antara masyarakat sekitar dan lingkungan perusahaan mendorong terciptanya CSR. Oleh karena itu, CSR ditujukan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan sekelilingnya.
- Pemberian bantuan dalam bentuk uang hanya akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Program akan lebih baik jika diberikan dalam bentuk pelatihan, bibit, dan program-program pemberdayaan ataupun barang yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang; daripada uang tunai.
- Keterwakilan kelompok seyogianya diupayakan melalui satu pintu.
- Perlu melakukan transparansi pada saat pemberian dan penerimaan dana bantuan.
- Perusahaan harus berani menolak permintaan dari instansi pemerintah yang bersifat pribadi, sekedar memanfaatkan fasilitas perusahaan, tidak wajar atau tepat guna.

Kelompok III

“How to define the CSR (CSR perspective)?”

Bagaimana Menerjemahkan CSR ? CSR selama ini dipahami melalui dasar pemikiran yang berbeda. Ada pengertian yang mendasarkan pada pandangan bahwa CSR dibangun atas dasar “voluntary” dan “philanthropy” dan pada kutub lain ada pandangan bahwa CSR semestinya bersifat “mandatory” atau “regulatory” sebagaimana halnya diatur dalam kewajiban terkait dengan AMDAL maupun produk hukum lain.

Tujuan CSR

- a) Peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, keluarga, pendidikan RT, kesehatan
- b) Memacu pertumbuhan ekonomi daerah, yang lebih bersifat makro, di tingkat kecamatan, kabupaten. Sehingga CSR bisa menjadi value added.
- c) Meningkatkan kemandirian. Jangan sampai jika thn 2021 KPC selesai, masyarakat belum mandiri, sehingga tidak ada sustainability. Meskipun thn 2021 KPC selesai beroperasi tetapi kegiatan CSR akan berlanjut s/d thn 2025 untuk memastikan bahwa Amanat AMDAL tsb sudah terpenuhi.

Jika dilihat dari sasaran/target penerima manfaat (beneficiaries), program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan biasanya ditujukan kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan kalangan internal perusahaan itu sendiri. Pemda mulai dari tingkat paling kecil hingga ke tingkat provinsi dengan skala dan ukuran yang berbeda. Masyarakat di sini adalah mereka yang ada di sekitar tambang dan menerima dampak akibat kegiatan perusahaan.

Sementara itu berdasarkan jenisnya, program-program CSR diimplementasikan melalui kegiatan ComDev, pembangunan infrastruktur, beasiswa, peningkatan kualitas SDM, dan lain-lain.

Terdapat berbagai mekanisme perencanaan program-program CSR, diantaranya dilakukan melalui Musrenbang, Forum-forum Stakeholder. Mekanisme ini kemudian diintegrasikan dengan kebijakan perusahaan. Dalam hal implementasi program-program CSR, perusahaan dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasinya. Peran Pemerintah Daerah menjadi penting dan strategis untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dan menghindari terjadinya overlapping antara program yang satu dengan yang lain. Namun demikian, seyogianya Pemerintah Daerah tidak terlibat dalam pelaksanaan program CSR, tetapi lebih kepada peran-peran koordinasi dan monitoring.

Pertanyaan :

- 1) Soal penerima manfaat, salah satunya adalah Pemda, hubungannya seperti apa?

Jawaban KPC :

Produk CSR semata-mata bukan donasi, tetapi juga dalam konteks ‘to empower’ / meberdayakan dan ‘to develop’. Anggapan bahwa ‘berikanlah kail, jangan berikan ikan’, menurut saya perusahaan harus melakukan dua-duanya. Pada kondisi tertentu masyarakat sekeliling juga memerlukan ‘ikan’,

bagaimana mereka mau mengail ke tengah laut kalau mereka lapar? Berikanlah ikan dulu – ini dinamakan 'to empower', setelah makan dan menjadi kenyang barulah ia berlayar, mengail mencari ikan.

Kalau KPC dapat melakukan CSR dengan baik, masyarakat sekitar makin sejahtera, tingkat kelayakan hidup makin tinggi, tugas pemerintah daerah dalam hal ini Bpk Bupati akan menjadi lebih ringan.

- 2) Apakah jika Bpk Bupati permohonan minta dibelikan bus, mobil atau lain-lainnya, apakah termasuk ?

Jawaban KPC :

Harus diakui sebenarnya hal tsb merupakan fakta, dan dapat menjadi salah satu manfaat yang dapat diperoleh Pemda, tetapi bukan merupakan rencana strategis dari perusahaan. Di KPC memang kita mengalokasikan dana utk donation.

- 3) Jika Pemda menjadi bagian penerima manfaat, itu berarti salah sasaran. Pemda mempunyai dana sendiri, yang ditakutkan jika hal ini dibiarkan akhirnya dana tsb akan habis hanya untuk hal-hal seperti itu.

Jawaban KPC:

Setuju sekali. Tetapi memang ada situasi-situasi tertentu yang susah dihindari, dan ada toleransi tertentu, karena dari sisi KPC sendiri harus transparan. Tetapi jelas itu bukan merupakan suatu program.

Kelompok IV

"Challenging factors in CSR implementation: (a) Effective stakeholder relation, (b) Internal policy & regulation"

Selama ini terdapat faktor-faktor berasal dari masyarakat dan internal perusahaan sendiri yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan program CSR, sebagai berikut:

(1) Dari masyarakat / LSM

- Terkait dengan soal transparansi perusahaan, baik dari segi pengelolaan dana, program yang tidak tepat guna, dan sebagainya.
- Program seyogianya ditujukan untuk memperkuat masyarakat, bukan untuk keperluan pemerintah.

(2) Dari perusahaan

- Banyaknya permintaan sementara perusahaan memiliki keterbatasan sumberdaya, sehingga perusahaan belum dapat mengakomodir keinginan / kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
- Dari segi cakupan wilayah, banyak permintaan program yang berasal dari masyarakat namun lokusnya sangat jauh lokasi perusahaan.

Mempertimbangkan dua faktor tantangan tersebut, dirumuskan suatu solusi sebagai berikut:

- Perusahaan perlu membuat Tim Perumus Monitoring Program yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain: (1) Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan LSM, (2) pemerintah daerah, dalam hal ini instansi yang terkait, (3) pihak legislatif, (4) perusahaan yang bersangkutan, dan (5) akademisi.

- Apabila terjadi penyimpangan alokasi budget CSR oleh salah satu Anggota Tim Perumus, dapat diajukan ke KPK.

Conclusion oleh Facilitator Yayan Cahyana

Berdasarkan diskusi hari ini CSR masih banyak kendala-kendala dan perusahaan sendiri mengalami kesulitan-kesulitan tertentu untuk menjalankan CSR secara baik. Memang masih banyak struktur-struktur, fasilitas, transparansi yang harus diterapkan perusahaan dan pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara baik. Tidak dapat dipungkiri hubungan antara pemerintah, masyarakat, perusahaan yang disebut dengan segitiga stakeholder sangat berperan sekali dalam menentukan arahan/program CSR.

Tambahan conclusion dari : Bambang Priatmono, KPC

Pembelajaran mengenai CSR ini penting untuk dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh IBL melalui 10 seri pembelajaran sangat penting dilakukan dan merupakan suatu kesimpulan karena walaupun tadi di salah satu meja terjadi keributan tetapi setelah dibicarakan dan didiskusikan bersama, hati & nalar berjalan, keributan bisa diselesaikan. Jadi pembelajaran CSR itu penting dan juga merupakan konklusi.

Facilitator : Memang betul sekali, tanpa adanya forum-forum seperti ini mungkin kita akan selalu misunderstanding. Sedikit berbicara tentang IBL, IBL telah melakukan forum-forum seperti ini sekitar 4-5 thn yang lalu dan fokus di segi korporasi. Kenapa fokus di korporasi? Karena setiap kali mengadakan forum seperti ini hanya dengan kelompok masyarakat dan pemerintah seringkali diskusi menjadi tidak produktif. Pemerintah, legislatif hingga sekarang belum memiliki pemahaman yang benar tentang konsep CSR sehingga keluarnya UU PT yang baru. Pertama, itu sangat diskriminasi, karena kalau berbicara soal CSR mengapa hanya SDA saja. Kedua, secara konsep lebih banyak ke arah community development, bukan ke arah CSR.